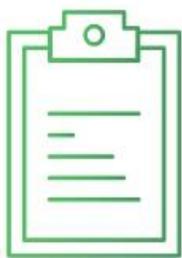




LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA/NAGARI
PEMERINTAH KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dapat diselesaikan. Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.

Dengan telah tersusunnya LKjIP DPMD/N Tahun 2021 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LKjIP ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pelaksana kegiatan yang telah bekerja secara maksimal dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan selama Tahun 2021. Semoga LKjIP ini dapat memberikan gambaran kinerja DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 dan bermanfaat bagi Masyarakat, khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Payakumbuh, Februari 2022

**KEPALA DPMD/N
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

ENDRA AMZAR, SH

NIP. 19680906 199603 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
Daftar Tabel	iv	
Daftar Gambar	vi	
Ikhtisar Eksekutif	vii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi	1
	C. Peran dan Isu Strategis	5
	D. Sistematika Penulisan	8
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	9
	A. Rencana Strategis (RENSTRA)	9
	B. Misi	12
	C. Perjanjian Kinerja	13
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	16
	A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	16
	B. Hasil Pengukuran Kinerja	17
	C. Analisis dan Capaian Kinerja	20
	D. Analisis Efisiensi	44
	E. Realisasi Anggaran	48
	F. Tindak Lanjut Atas Rekomendasi AKIP Terhadap Review LKjIP DPMDN Tahun 2020	52
BAB IV	PENUTUP	56
	A. Kesimpulan	56
	B. Langkah Peningkatan di Masa Datang	57
Lampiran		
	1. Perjanjian Kinerja (PK) dan PK Perubahan Tahun 2021	
	2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan RKT	



- Perubahan 2021
3. Realisasi Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021
 4. Sertifikat/Piagam Penghargaan Pencapaian Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Urusan Pemberdayaan Masyarakat



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Tahun 2021	4
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra DPMD/N	10
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021	14
Tabel 2.3	Anggaran Menurut Program Sesuai Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Nagari Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021	14
Tabel 2.4	Indikator Kinerja DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota Sesuai RPJMD Tahun 2016-2021	15
Tabel 2.5	Indikator Kinerja DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2019 Dan 2020-2021	15
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	17
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2021	18
Tabel 3.3	Indikator Kinerja DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2018	19
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Dan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2017-2019	19
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Dan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2020-2021	20
Tabel 3.6	Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 (Satu)	20
Tabel 3.7	Hasil Pengukuran Indikator Kinerja 1 (Satu) Sasaran Strategis 1 (Satu)	22
Tabel 3.8	Rekapitulasi Data Evaluasi Perkembangan Nagari Kab. Lima Puluh Kota 2018-2020	25
Tabel 3.9	Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke-2 (Dua)	27
Tabel 3.10	Badan Usaha Milik Nagari/Desa (Bumnag/Bumdes) Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021	28
Tabel 3.11	Data Perkembangan Badan Usaha Milik Nagari	33



	Kab. Lima Puluh Kota tahun 2017-2021	
Tabel 3.12	Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Persentase Lembaga Sosial Kemasyarakatan Yang Aktif	35
Tabel 3.13	Rekapitulasi Nagari Dengan Status Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Aktif 2020-2021	37
Tabel 3.14	PKK Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021	38
Tabel 3.15	Data Posyandu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021	39
Tabel 3.16	Data Strata Posyandu Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2021	40
Tabel 3.17	Rekapitulasi KPM Kabupaten Lima Puluh Kota 2020-2021	42
Tabel 3.18	Perbandingan Realisasi Dan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2018-2021	42
Tabel 3.19	Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mencapai Sasaran Strategis Tahun 2021	43
Tabel 3.20	Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Menurut Program Dan Kegiatan DPMD/N Tahun 2021	45
Tabel 3.21	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Nagari	49
Tabel 3.22	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Menurut Program Dan Kegiatan DPMD/N Tahun 2021	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota	3
Gambar 3.1	Persentase Nagari Yang Berkinerja Baik Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2020-2021	22
Gambar 3.2	Musrenbang Nagari Batu Balang dan Ampalu Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021	23
Gambar 3.3	Jumlah Nagari Yang Memiliki Nilai Perkembangan Nagari Diatas 300 Berdasarkan Evaluasi Perkembangan Nagari Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2020	27
Gambar 3.4	Perkembangan Status Badan Usaha Milik Nagari Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2017 - 2021	32
Gambar 3.5	Perkembangan LPM Nagari Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2021	36
Gambar 3.6	Kegiatan Tim Penggerak – PKK Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021	38
Gambar 3.7	Kegiatan Tim Penggerak – PKK, Posyandu Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021	40
Gambar 3.8	Bimtek / Workshop KPM dan RDS Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021	41



IKHTISAR EKSEKUTIF

LKjIP merupakan dokumen pertanggungjawaban yang menyajikan informasi capaian kinerja instansi pemerintah daerah. Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur, atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh perangkat daerah. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021, ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja. Sasaran strategis pertama adalah meningkatnya kinerja pemerintahan desa/nagari, dengan indikator kinerja yaitu: persentase nagari yang berkinerja baik (Predikat A, RKP, APBD/N dan LKPJ Tepat Waktu) dan persentase nagari yang memiliki nilai perkembangan nagari di atas 300 berdasarkan evaluasi perkembangan nagari. Sasaran strategis kedua adalah meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan, dengan indikator kinerja yaitu: persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dan persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif.

Pencapaian terhadap indikator kinerja ini secara keseluruhan adalah **“sangat baik”** dengan rata-rata persentase capaian sebesar **103%**. Semua indikator kinerja mempunyai capaian sangat tinggi (diatas 100%). Indikator Kinerja Persentase Nagari yang berkinerja Baik (Predikat A, RKP, APBD/N dan LKPJ Tepat Waktu) belum mencapai target kinerja Tahun 2021, dengan tingkat capaian 101%. Indikator persentase nagari yang memiliki nilai perkembangan nagari di atas 300 berdasarkan evaluasi perkembangan nagari, mempunyai capaian melebihi target yang telah ditetapkan, dengan nilai capaian 106%. Indikator kinerja persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif, dengan tingkat capaian 101%. Indikator persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif, dengan capaian 105%. Dengan demikian realisasi sasaran strategis urusan pemberdayaan masyarakat pada akhir periode RPJMD Tahun 2021 dengan sasaran strategis



meningkatnya kinerja pemerintahan Desa/Nagari dan meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan telah tercapai dengan sangat baik.

Dengan telah disusunnya LKjIP Tahun 2021 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat dan seluruh pihak terkait atas capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari tahun anggaran ini. Sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu tahapan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai sesuai dengan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Dasar penyusunannya adalah Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan visi dan misi organisasi secara periodik dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. GAMBARAN UMUM DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Lima Puluh Kota No. 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tugas dan Wewenang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari diatur dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

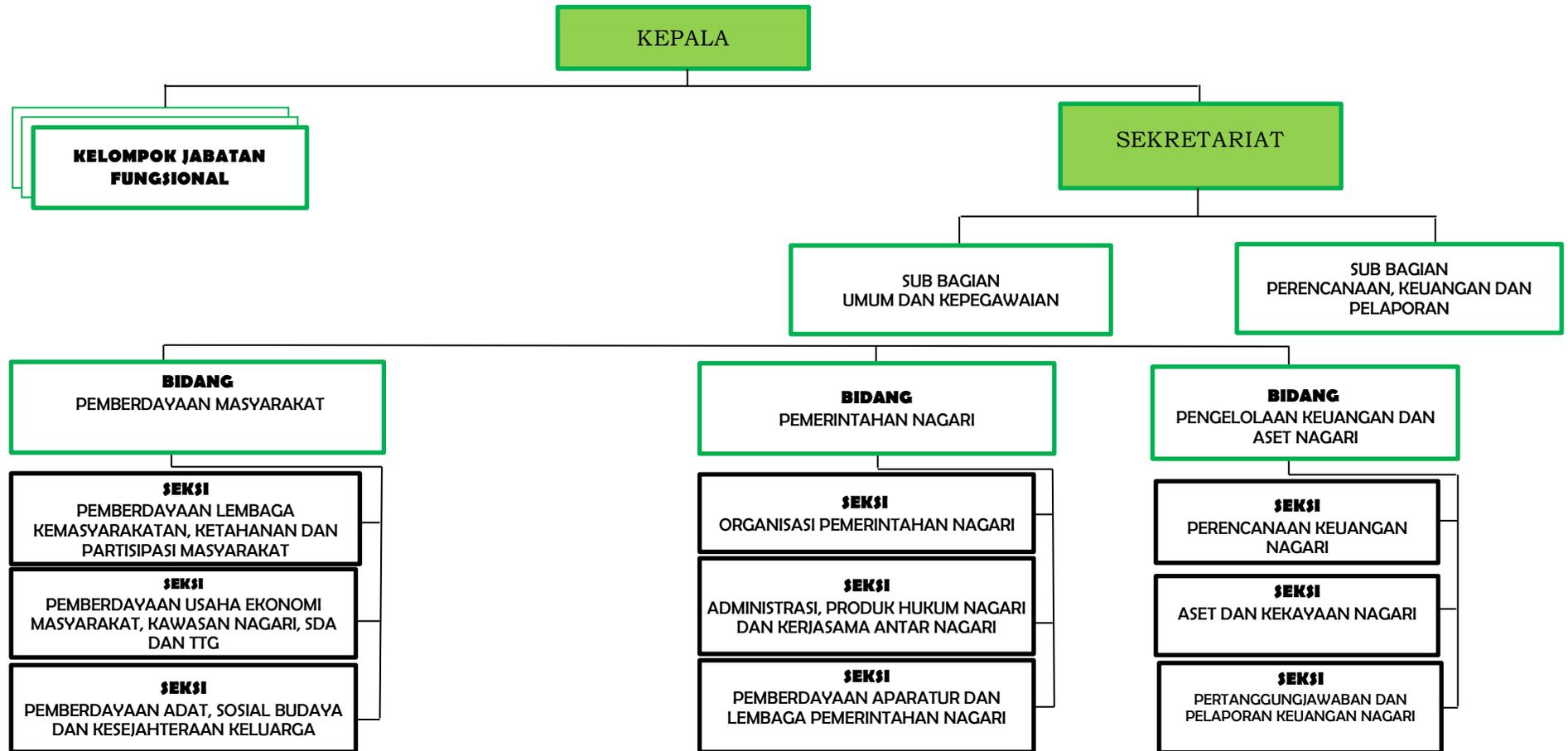
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari merupakan pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat
 2. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kawasan Nagari, SDA dan TTG
 3. Seksi Pemberdayaan Adat, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Keluarga
- d. Bidang Pemerintahan Nagari, terdiri dari:
 1. Seksi Organisasi Pemerintahan Nagari
 2. Seksi Administrasi, Produk Hukum Nagari dan Kerjasama Antar Nagari
 3. Seksi Pemberdayaan Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Nagari
- e. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan Keuangan Nagari
 2. Seksi Aset dan Kekayaan Nagari
 3. Seksi Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Nagari
- f. Unit Pelaksana Teknis
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selengkapnya struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dapat dilihat pada Gambar 1.1

Gambar 1.1.
STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Pada tahun 2021, jumlah keseluruhan Sumber Daya Manusia DPMD/N adalah sebanyak 44 pegawai. Terdiri dari 24 pegawai ASN, dan 20 pegawai non ASN (Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas). Dilihat dari komposisinya terdiri 14 pejabat struktural, didukung oleh 30 staf. Selengkapnya data Sumber Daya Manusia DPMD/N tahun 2021 ditampilkan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
DATA SUMBER DAYA MANUSIA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/NAGARI TAHUN 2021

NO	URAIAN	2021
1	Jumlah Pegawai ASN	28
	a. Eselon II	0
	b. Eselon III	4
	c. Eselon IV	10
	d. Fungsional	0
	e. Staf	10
	f. Jumlah Pegawai Gol IV	
	- Pendidikan S2	4
	- Pendidikan S1	0
	- Pendidikan Diploma	0
	- Pendidikan SLTA/Sederajat	0
	g. Jumlah Pegawai Gol III	
	- Pendidikan S2	1
	- Pendidikan S1	12
	- Pendidikan Diploma	1
	- Pendidikan SLTA/Sederajat	1
	h. Jumlah Pegawai Gol II	
	- Pendidikan S1	0
	- Pendidikan Diploma	0
	- Pendidikan SLTA/Sederajat	5
	i. Jumlah Pegawai Gol I	
	- Pendidikan SD	0
	- Pendidikan S1	0
	- Pendidikan Diploma	0
	- Pendidikan SLTA/Sederajat	0
2	Jumlah Pegawai Non ASN	20
	a. Jumlah Pegawai PTT	2
	- Pendidikan S2	0
	- Pendidikan S1	0
	- Pendidikan Diploma	1

NO	URAIAN	2021
	- Pendidikan SLTA/Sederajat	1
	b. Jumlah Kontrak	18
	- Pendidikan S1	6
	- Pendidikan Diploma	3
	- Pendidikan SLTA/Sederajat	9
	- SD	0
Total		44

C. PERAN DAN ISU STRATEGIS

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari yang kemudian disingkat DPMD/N mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan di bidang Pemberdayaan Masyarakat. Tugas ini merupakan peran strategis DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mencapai visi dan misi ke-5 Bupati Lima Puluh Kota yaitu **“Memperkuat Kelembagaan Nagari untuk Melaksanakan Pembangunan Berbasis Jorong”**. Selanjutnya DPMD/N mempunyai peran strategis dalam mendukung Nawa Cita ke-3 Pembangunan Nasional yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Kedudukan dan eksistensi desa diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau Nagari di Kabupaten dan Kota diberikan kewenangan yang cukup besar dan dibarengi dengan porsi anggaran yang cukup memadai untuk kondisi saat ini. Dari sisi anggaran diamanahkan untuk mengalokasikan anggaran Dana Desa (DD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota masing – masing.

Selanjutnya, menurut Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No.78 Tahun 2018 pasal 4 Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari secara rinci dalam menjalankan peran strategisnya adalah:

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Pemberdayaan Masyarakat, bidang Pemerintahan Nagari dan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari;
 - c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang Pemberdayaan Masyarakat, bidang Pemerintahan Nagari dan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset nagari;
 - d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Produk Hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Pemberdayaan Masyarakat, bidang Pemerintahan Nagari dan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari;
 - f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
 - g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas;
 - h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan Anggaran Dinas; dan

- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat, permasalahan atau isu-isu strategis yang dihadapi diantaranya:

1. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur Pemerintah dan kelembagaan di pemerintahan nagari dalam memahami tugas, pokok dan fungsinya.
2. Kurang berfungsinya Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan. Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan sebagai penggerak utama dalam pembangunan nagari belum dapat mendorong masyarakat nagari untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan nagari.
3. Menurunnya nilai-nilai sosial Masyarakat dan penghargaan terhadap adat dan istiadat budaya lokal.
4. Melemahnya Usaha Ekonomi Masyarakat.
5. Kurang optimalnya pengelolaan Sumberdaya Nagari, Potensi Nagari dan Teknologi Tepat Guna serta lingkungan hidup.
6. Terlambatnya penyusunan perencanaan keuangan nagari, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, belum optimal pendataan dan pengelolaan aset dan kekayaan nagari.
7. Belum optimalnya penataan produk hukum nagari, penataan administrasi pemerintahan nagari.
8. Belum optimalnya sosialisasi peraturan terkait Penataan Nagari serta Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Tapal Batas Nagari ke seluruh Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan LkjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 mengacu pada Pasal 129 PermenPAN-RB NO. 53 Tahun 2014 dan mempedomani Perbup Lima Puluh Kota No. 3 Tahun 2018, yang terdiri dari empat bab dengan uraian sebagai berikut:

I. Pendahuluan.

Bab pendahuluan menjelaskan latar belakang penyusunan LKjIP DPMD/N Tahun 2021, gambaran umum dan struktur organisasi, peran dan isu strategis, serta sistematika penulisan LKjIP.

II. Perencanaan Kinerja.

Bab dua ini menjelaskan tentang Rencana Strategis (RENSTRA) OPD, penjabaran misi dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

III. Akuntabilitas Kinerja.

Bab tiga memuat penjelasan terhadap akuntabilitas kinerja yang dirinci sebagai berikut: metodologi pengukuran capaian target kinerja, hasil pengukuran kinerja, analisis dan capaian kinerja, analisis efisiensi, realisasi anggaran dan tindak lanjut terhadap rekomendasi AKIP atas review LKjIP DPMD/N Tahun 2020.

IV. Penutup.

Bab ini merupakan ketentuan penutup.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jonto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021. Kemudian ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2016-2021.

Adapun Tujuan Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dalam dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN
ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DPMD/N

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2		3	4
<i>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari</i>	1.	Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan Nagari.	1. Mengotimalkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, tranparan dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan publik.	1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan nagari berdasarkan undang-undang desa. 2. Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Nagari. 3. Meningkatkan pelayanan publik yang inovatif dan berkualitas bagi masyarakat Nagari.
			2. Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Nagari dan masyarakat dalam memanfaatkan potensi dan aset Nagari.	1. Mendorong percepatan pembangunan nagari dengan kemandirian.
			3. Meningkatkan sinergitas seluruh elemen	1. Memperkuat Kelembagaan Nagari dan masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
		masyarakat dalam membangun Nagari.	untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan Nagari.
		4. Memonitoring dan Mengevaluasi Status Perkembangan Nagari.	1. Menetapkan nagari yang status perkembangannya perlu ditingkatkan. 2. Bekerjasama/ koordinasi dengan lintas OPD dan Kecamatan. 3. Mensinkronkan program dan kegiatan dengan Lintas OPD terkait.
		5. Melakukan penyempurnaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa/nagari.	1. Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Nagari.
	2.	Meningkatkan Kualitas Lembaga Kemasyarakatan	1. Meningkatkan Pemahaman masyarakat tentang Fungsi dan Peranan Badan Usaha Milik Desa/Nagari (BumNag) dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat.
			1. Fasilitasi, Sosialisasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa/Nagari/ (BumNag).
			2. Fasilitasi pembinaan usaha ekonomi Mikro Pedesaan.
			2. Pembinaan dan Pendampingan Usaha Mikro dan Kecil di Pedesaan.
			3. Penataan dan Penguatan kerjasama Usaha Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
		3. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG).	3. Penataan dan Penguatan kerjasama Usaha Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
	3.	Meningkatnya Akuntabilitas	1. Meningkatkan kualitas dokumen

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
	Kinerja, Keuangan dan Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari	perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah.	perencanaan, pelaporan dan keuangan yang berkualitas, peningkatan kualitas SDM dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang.

B. MISI

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) menyelenggarakan Misi ke-5 dari RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu **“Memperkuat Kelembagaan Nagari untuk Melaksanakan Pembangunan Berbasis Jorong”**. Tujuan yang akan dicapai yaitu *“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari”* dengan sasarannya adalah *“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari”*. Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendukung Visi dan Misi Bupati Terpilih, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) juga melakukan sinkronisasi Program dan Kegiatan dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Propinsi Sumatera Barat. Selain itu juga melakukan sinkronisasi dengan tujuan dan sasaran strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri (Permendagri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian) yaitu tujuan dan sasaran strategis ke-4 yaitu: *“Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa, dengan jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik, jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel”*. Kemudian disesuaikan pula dengan arah kebijakan pada Renstra Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

yaitu: *“Mengembangkan perekonomian masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah masyarakat dengan karakteristik, posisi strategis, dan konektivitas antar wilayah yang meliputi peningkatan infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran.”*

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2021 antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dengan Bupati Lima Puluh Kota terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja. Perjanjian Kinerja ini didukung oleh 5 program yaitu: 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, 4 Program yang dilaksanakan oleh tiga bidang yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 mengikuti perubahan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMD/N Tahun 2020. Pada Tahun 2021, target indikator kinerja mengalami perubahan terkait dengan tidak dapat dilaksanakannya beberapa kegiatan karena refocussing anggaran.

Uraian dari sasaran strategis dan indikator kinerja DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa/Nagari, dengan indikator kinerja yaitu:
 - 1.1. Persentase Nagari yang berkinerja Baik (Predikat A, RKP, APBD/N dan LKPJ Tepat Waktu).
 - 1.2. Persentase Nagari yang memiliki Nilai Perkembangan Nagari diatas 300 Berdasarkan Evaluasi Perkembangan Nagari.
2. Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan, dengan indikator kinerja yaitu:
 - 2.1. Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang aktif.
 - 2.2. Persentase Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang aktif.

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA/NAGARI KAB. LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			PK Awal	PK Perubahan
1	2	3	4	
1.	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa /Nagari	1. Persentase Nagari yang berkinerja Baik (Predikat A, RKP, APBD/N dan LKPJ Tepat Waktu)	100%	92%
		2. Persentase Nagari yang memiliki Nilai Perkembangan Nagari diatas 300 Berdasarkan Evaluasi Perkembangan Nagari	94%	94%
2.	Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan	1. Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif	95%	70%
		2. Persentase Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang Aktif	100%	95%

Tabel 2.3
ANGGARAN MENURUT PROGRAM SESUAI PERJANJIAN KINERJA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
KAB. LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021

PROGRAM /KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)
1	2	3
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,245,653,358
2	Program Penataan Desa	30,639,200
3	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	3,345,100
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	507,547,300
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	751,566,600
TOTAL		4,538,751,558

Sebagai perbandingan indikator kinerja sesuai dengan RPJMD 2016-2021, dan perbandingan indikator kinerja tahun 2020 dengan 2019, disajikan pada Tabel 2.4 dan 2.5. Dengan adanya perubahan indikator kinerja ini, kita tidak dapat membandingkan

pencapaian pada awal tahun sampai dengan akhir periode RPJMD. Data pencapaian yang disajikan berdasarkan perjanjian kinerja yang telah dirubah pada Tahun Anggaran 2020.

Tabel 2.4
INDIKATOR KINERJA DPMD/N
KAB. LIMA PULUH KOTA SESUAI RPJMD TAHUN 2016-2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD 2021
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari yang Berstatus Berkembang dan Maju	70 Nagari
		Persentase Nagari yang Menetapkan RKP Tepat waktu	30 %
2.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Persentase Peningkatan Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif	75 %

Tabel 2.5
INDIKATOR KINERJA DPMD/N
KAB. LIMA PULUH KOTA TAHUN 2019 DAN 2020-2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA 2019		INDIKATOR KINERJA 2020-2021	
1	2	3		4	
1.	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa /Nagari	1.	Jumlah Bimtek/Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari yang Dilaksanakan	1.	Persentase Nagari yang berkinerja Baik (Predikat A, RKP, APBD/N dan LKPJ Tepat Waktu)
		2.	Persentase Nagari yang Menyampaikan Dokumen APBNagari Dan LKPJ Tepat Waktu	2.	Persentase Nagari yang memiliki Nilai Perkembangan Nagari diatas 300 Berdasarkan Evaluasi Perkembangan Nagari
2.	Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan	1.	Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif	1.	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif
		2.	Jumlah Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang Aktif	2.	Persentase Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang Aktif
		3.	Jumlah Nagari yang Memiliki Nilai Perkembangan Nagari Diatas 300 Berdasarkan Evaluasi Perkembangan Nagari		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah merupakan perwujudan kewajiban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (DPMD/N) Kab. Lima Puluh Kota dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan ini menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kebijakan/program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian indikator kinerja sasaran dengan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota.

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Berisikan metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
KLASIFIKASI PENILAIAN INDIKATOR
KINERJA PERANGKAT DAERAH

NO	KLASIFIKASI PENILAIAN	PREDIKAT
1	2	3
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 dan perubahan IKU serta Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021, maka ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 mengalami perubahan pada target kinerja. Hal ini terkait dengan dilakukannya *refocussing* anggaran karena Bencana Covid 19, sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Kegiatan yang tidak dapat terlaksana ini akan berdampak pada target kinerja yang dicapai, sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian. Pada Tabel 3.2 berikut ini merupakan hasil pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2021.

Tabel 3.2
HASIL PENGUKURAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa/Nagari	Persentase Nagari yang berkinerja Baik (Predikat A, RKP, APBD/N dan LKPJ Tepat Waktu)	92%	93%	101%	Sangat Tinggi
		Persentase Nagari yang memiliki Nilai Perkembangan Nagari diatas 300 Berdasarkan Evaluasi Perkembangan Nagari	94%	100%	106%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif	70%	71%	101%	Sangat Tinggi
		Persentase Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang Aktif	95%	100%	105%	Sangat Tinggi

Pada Tabel 3.3 berikut ini disajikan hasil pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2018 sebagai gambaran pencapaian target untuk RPJMD 2016-2021 dengan menggunakan IKU sesuai Renstra DPMDN sebelum perubahan (Perbup No. 112 Tahun 2018). Pada Tabel 3.4 disajikan perbandingan realisasi dan capaian sasaran strategis tahun 2017-2019 dengan menggunakan Indikator Kinerja yang mengalami perubahan pada Tahun 2019. Pada Tabel 3.5 disajikan perbandingan realisasi dan capaian sasaran strategis tahun 2020-2021 dengan menggunakan Indikator Kinerja yang mengalami perubahan pada Tahun 2020.

Tabel 3.3
INDIKATOR KINERJA DPMD/N
KAB. LIMA PULUH KOTA TAHUN 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari yang Berstatus Berkembang dan Maju	70 Nagari	70 Nagari	100 %
		Persentase Nagari yang Menetapkan RKP Tepat waktu	30 %	45.57%	152%
2.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Persentase Peningkatan Badan Usaha Milik Nagari yang Aktif	75 %	64 %	85 %

Sumber: LKjIP DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota, 2018.

Tabel 3.4
PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN
SASARAN STRATEGIS TAHUN 2017-2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			CAPAIAN		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa/Nagari	Jumlah Bimtek/Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari yang Dilaksanakan	-	-	10	-	-	250%
	Persentase Nagari yang Menyampaikan Dokumen APBNagari dan LKPJ Tepat Waktu	-	-	55.7%	-	-	111%
Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif	27	42	54	-	-	85.71%
	Jumlah Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang Aktif	-	-	46	-	-	95.83%
	Jumlah Nagari yang Memiliki Nilai Perkembangan Nagari Diatas 300 Berdasarkan Evaluasi Perkembangan Nagari	-	75	75	-	-	104%

Sumber: LKjIP DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota, 2019.

Tabel 3.5
PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN
SASARAN STRATEGIS TAHUN 2020-2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		PERSENTASE CAPAIAN	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa/Nagari	Persentase Nagari yang berkinerja Baik (Predikat A, RKP, APBD/N dan LKPJ Tepat Waktu)	75%	92%	78%	93%	104%	101%
	Persentase Nagari yang memiliki Nilai Perkembangan Nagari diatas 300 Berdasarkan Evaluasi Perkembangan Nagari	94%	94%	100%	100%	106%	106%
Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif	90%	70%	78%	71%	87%	101%
	Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Aktif	87%	95%	92%	100%	106%	105%

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2021 sesuai dengan Tabel 3.2, maka dapat dianalisis capaian target dan realisasi indikator kinerja menurut sasaran strategis masing-masingnya.

1. Sasaran Strategis 1 yaitu: Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa/Nagari.

Tabel 3.6
HASIL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS 1 (SATU)

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJM	REALISASI 2020	2021		
				TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
A.	Persentase Nagari yang berkinerja Baik (Predikat A, RKP, APBD/N dan LKPJ Tepat Waktu)	-	78%	92%	93%	101%

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJM	REALISASI 2020	2021		
				TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
B.	Persentase Nagari yang memiliki Nilai Perkembangan Nagari diatas 300 Berdasarkan Evaluasi Perkembangan Nagari	-	100%	94%	100%	106%

a) Persentase Nagari yang berkinerja Baik (Predikat A, RKP, APBD/N dan LKPJ Tepat Waktu)

Sasaran strategis 1 dengan indikator kinerja yang pertama yaitu Persentase Nagari yang berkinerja Baik (Predikat A, RKP, APBD/N dan LKPJ Tepat Waktu). Target yang ditetapkan adalah sebanyak **92%**. Indikator penyelenggaraan pemerintahan nagari yang berkinerja baik diantaranya dilihat dari **tepat waktunya penyampaian dokumen penyelenggaraan pemerintahan nagari**. Dokumen tersebut adalah Dokumen **RKP Nagari**, **APBNagari**, dan **LKPJ Wali Nagari**. Semakin banyaknya Nagari yang menyusun dan menyampaikan Dokumen RKP Nagari, APBNagari dan LKPJ Wali Nagari sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka semakin baik kinerja DPMD/N dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Pemerintahan Nagari.

RKP Nagari tahun 2022

Pada tahun 2021, dokumen penyelenggaraan pemerintahan nagari yang wajib disampaikan ke DPMD/N diantaranya adalah RKP Nagari tahun 2022, APBNagari tahun 2021 dan LKPJ Wali Nagari tahun 2020. RKP Nagari tahun 2022 wajib disampaikan mulai dari bulan Desember 2020 sampai Januari 2021. Adapun Jumlah nagari yang menyampaikan RKP Nagari tahun 2022 tepat pada waktunya adalah **66 nagari** dari **79 nagari**, dengan persentase **84%**.

APBNagari tahun 2021

Untuk Penyampaian APBNagari 2021, wajib disampaikan mulai dari bulan Januari sampai Maret 2021. Sebanyak **74 nagari** telah menyampaikan APBNagari tahun 2021 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Oleh karena itu persentase capaian penyampaian APBNagari tahun 2021 sebesar **94%**.

LKPJ Wali Nagari tahun 2020

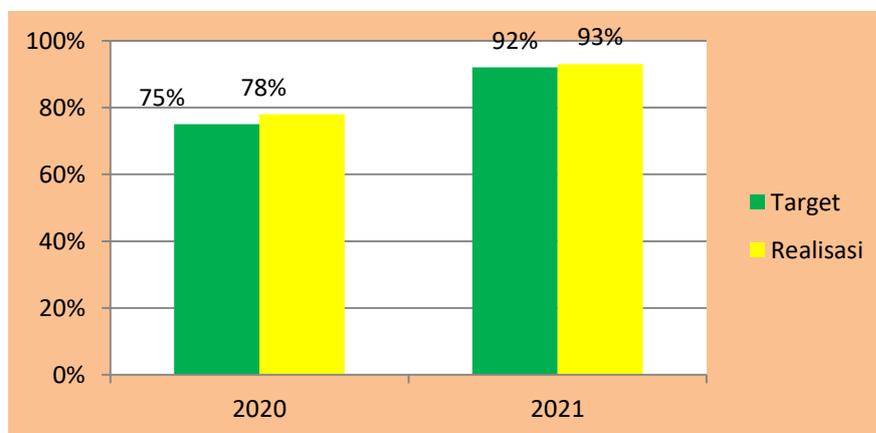
LKPJ Wali Nagari tahun 2020 disampaikan oleh pemerintah nagari mulai dari bulan Januari sampai Maret 2021. Terdapat **79 nagari** dari 79 nagari yang menyampaikan LKPJ Wali Nagari sesuai jadwal tersebut. Persentase capaiannya adalah sebesar **100%**.

Tabel 3.7
HASIL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA 1 (SATU)
SASARAN STRATEGIS 1 (SATU)

INDIKATOR	JUMLAH NAGARI	PERSENTASE
RKP Nagari tahun 2022	66 Nagari	84%
APBNagari tahun 2021	74 Nagari	94%
LKPJ Wali Nagari tahun 2020	79 Nagari	100%
Rata-rata Persentase		93%

Sumber: Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota, 2021.

Gambar 3.1
PERSENTASE NAGARI YANG BERKINERJA BAIK
DI KAB. LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020-2021



Dari persentase penyampaian RKP nagari tahun 2022, APBNagari tahun 2021 dan LKPJ Wali Nagari tahun 2020, maka indikator Persentase Nagari yang berkinerja baik (Predikat A RKP, APBN, dan LKPJ Tepat Waktu) adalah **93%**.

Gambar 3.2
MUSRENBANG NAGARI BATU BALANG DAN NAGARI AMPALU
KAB. LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021



Sumber: Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota, 2021.

Gambar 3.2 merupakan dokumentasi Musrenbang Nagari Ampalu Kec. Lareh Sago Halaban, Penetapan RKP Nagari Tahun 2022 dan Daftar Usulan (DU) RKP Tahun 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2021. Kemudian Musrenbang Nagari Batu Balang yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2021. Musrenbang Nagari ini merupakan rangkaian perencanaan kerja Nagari dalam rangka penyusunan dokumen RKP Nagari dan APBNagari. Musrenbang dilaksanakan oleh 79 Nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

b) Persentase Nagari yang Memiliki Nilai Perkembangan Nagari Diatas 300 Berdasarkan Evaluasi Perkembangan Nagari

Sasaran strategis 1 dengan indikator kinerja yang kedua adalah persentase Nagari yang memiliki nilai perkembangan nagari diatas 300 berdasarkan evaluasi perkembangan Nagari. Data yang

digunakan untuk mengukur indikator ini adalah data Evaluasi Perkembangan Nagari (EPNag) berdasarkan **Permendagri Nomor 81 Tahun 2015** tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah suatu upaya penilaian yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa dan kelurahan.

Menurut pasal 17 Permendagri ini, evaluasi di tingkat desa dan kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan minggu ketiga Februari. Kemudian evaluasi perkembangan desa dan kelurahan oleh kecamatan dilaksanakan pada minggu keempat Februari sampai dengan Maret. Kecamatan melaporkan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan, kepada kabupaten/kota paling lambat pada Minggu Pertama Bulan April. Sehingga hasil evaluasi perkembangan Nagari Tahun 2021, baru akan diperoleh paling cepat pada minggu pertama bulan April. Oleh karena itu, data yang disampaikan untuk **Pelaporan Tahun 2021** pada LKjIP ini adalah data **Evaluasi Perkembangan Nagari** untuk **Tahun 2020**.

Evaluasi perkembangan nagari dilakukan terhadap tiga bidang yaitu: bidang pemerintahan desa/nagari, bidang kewilayahan desa/nagari dan bidang kemasyarakatan. Masing-masing bidang mempunyai komponen yang akan dinilai dengan poin (skor) tertentu dalam rentang waktu Januari sampai dengan Desember. Kemudian rekapan penilaian dari hasil perkembangan desa akan dikelompokkan menurut kategori berikut ini:

- a. Nilai di atas atau sama dengan 451 dikategorikan **desa cepat berkembang**.
- b. Nilai 301 sampai dengan 450 dikategorikan **desa berkembang**.
- c. Nilai di bawah atau sama dengan 300 dikategorikan **desa kurang berkembang**.

Tabel 3.8
REKAPITULASI DATA EVALUASI PERKEMBANGAN NAGARI
KAB. LIMA PULUH KOTA 2018-2020

STATUS PERKEMBANGAN NAGARI	TAHUN		
	2018	2019	2020
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
CEPAT BERKEMBANG (≥ 451)	13	34	44
BERKEMBANG (301-450)	62	45	35
KURANG BERKEMBANG (≤ 300)	4	0	0
TOTAL NAGARI	79	79	79

Sumber : Bidang Pemerintahan Nagari DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota, 2021.

Target yang ditetapkan untuk capaian kinerja Tahun 2021 (Epnag Tahun 2020) adalah **94%** (74 Nagari) yang memiliki nilai Perkembangan Nagari diatas 300 berdasarkan Evaluasi Perkembangan Nagari. Dari data Evaluasi Perkembangan Nagari Tahun 2020, semua Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu **79 Nagari** memiliki nilai diatas 300. Rekapitulasi data Evaluasi Perkembangan Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.8. Pada Tahun 2020 (Pelaporan 2021) nagari cepat berkembang meningkat menjadi 44 Nagari. Nagari berkembang yang pada Tahun 2019 sebanyak 45 Nagari, menjadi 35 Nagari. 15 Nagari tumbuh dari nagari berkembang menjadi Nagari Cepat Berkembang. Nagari-nagari tersebut adalah : Durian Gadang, Banja Loweh, Baruah Gunuang, Situjuah Ladang Laweh, Tungka, Halaban, Tanjung Gadang, Pandam Gadang, Lubuak Batingkok, Gurun, Solok Bio-Bio, Simalanggang, Taeh Baruah, Sungai Rimbang, Andieng. Sementara terdapat 5 Nagari yang mengalami penurunan status dari Nagari Cepat Berkembang menjadi Nagari Berkembang yaitu Pauh Sangik, Mungka, Batu Payuang, Koto Tuo, Tanjung Haro Sikabu-Kabu Pd Panjang.

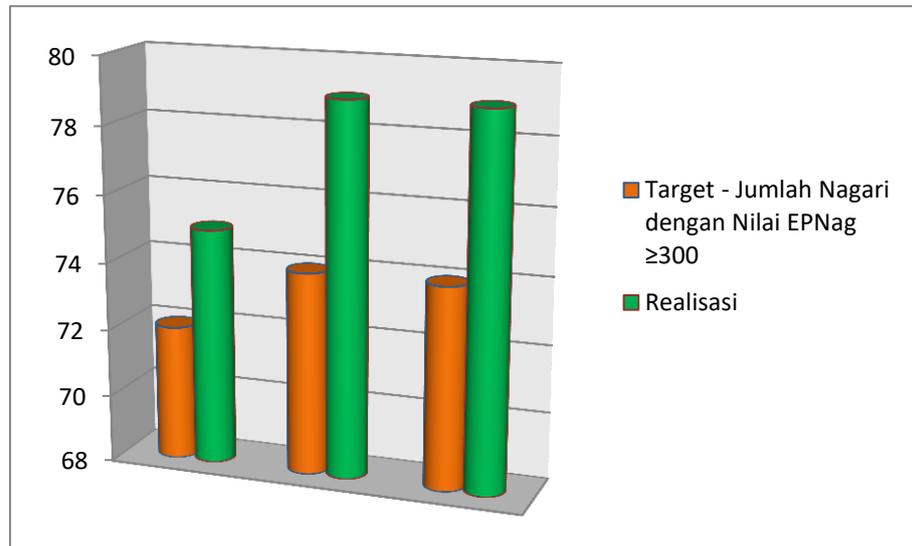
Hasil Pengukuran

$$(\%) = \frac{79 \text{ Nagari}}{79 \text{ Nagari}} = 100\%$$

Pencapaian sebesar **100%**, artinya **seluruh nagari** yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu 79 Nagari telah memiliki nilai perkembangan nagari diatas 300. Persentase capaian adalah sebesar **106%**. Capaian ini telah melebihi target yang ditetapkan.

- **Nagari Berkembang** : Kurai, Tanjuang Bungo, Koto Baru Simalanggang, Sungai Beringin, Piobang, Andaleh, Tarantang, Bukik Limbuku, Pilubang, Manggilang, Tanjuang Balik, Gunuang Malintang, Pangkalan, Koto Alam, Tanjung Pauh, Koto Lamo, Sialang, Galugua, Ampalu, Bukik Sikumpa, Balai Panjang, Sitanang, Situjuh Banda Dalam, Jopang Manganti, Talang Maur, Sungai Antuan, Maek, Koto Tengah, Suayan, Pauh Sangik, Mungka, Batu Payuang, Koto Tuo, Tanjuang Haro Sikabu-Kabu Pd Panjang.
- **Nagari Cepat Berkembang** : Durian Gadang, Sungai Balantiak, Batuhampar, Koto Tengah Batu Ampa, Sariak Laweh, Banja Loweh, Baruah Gunuang, Sungai Naniang, Simpang Kapuak, Situjuh Ladang Laweh, Tungka, Situjuh Gadang, Situjuh Batua, Halaban, Tanjuang Gadang, Labuah Gunuang, Talang Anau, Koto Tinggi, Pandam Gadang, Durian Tinggi, Lubuak Alai, Koto Bangun, Muaro Paiti, Lubuak Batingkok, Gurun, Solok Bio-Bio, Sarilamak, Batu Balang, Harau, Taram, Sungai Kamuyang, Mungo, Koto Tengah Simalanggang, Simalanggang, Taeh Bukik, Taeh Baruah, Simpang Sugiran, Kubang, Sungai Talang, Tujuh Koto Talago, Guguak VIII Koto, Limbanang, Suliki, Sungai Rimbang, Andieng.

Gambar 3.3
JUMLAH NAGARI YANG MEMILIKI NILAI PERKEMBANGAN NAGARI DIATAS
300 BERDASARKAN EVALUASI PERKEMBANGAN NAGARI KAB. LIMA PULUH
KOTA TAHUN 2020



2. Strategis ke-2 yaitu: Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan.

Tabel 3.9
HASIL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS Ke-2 (DUA)

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016-2021	REALISASI 2020	2021		
				TARGET	REALISASI	%
1.	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif	-	78%	70%	71%	101%
2.	Persentase Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang Aktif	-	92%	95%	100%	105%

a) Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat Yang Aktif

Indikator kinerja pertama pada sasaran strategis ke-2 adalah persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif dengan target sebesar **71%**. Data yang diambil untuk menghitung persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif adalah persentase Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) yang aktif selama Tahun 2021. Pencapaian pada Tahun 2021 adalah sebanyak **48** Bumnag aktif dari **68** Bumnag yang terbentuk. Jika dipersentasekan yaitu

sebesar **71%** dari keseluruhan Bumrag. Diukur dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 70% Bumrag aktif, maka pencapaian Tahun 2021 adalah sebesar **101%**.

Hasil Pengukuran

$$(\%) = \frac{\text{Bumrag Aktif}}{\text{Total Bumrag}} = \frac{48}{68} = 71\%$$

Pada tabel 3.10 berikut, dapat dilihat data Bumrag/Bumdes Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021 beserta status, lokasi dan jenis usahanya masing-masing.

Tabel 3.10
BADAN USAHA MILIK NAGARI/DESA (BUMNAG/BUMDES)
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	NAGARI	NAMA BUMNAG	PERATURAN NAGARI	TAHUN PENDIRIAN	PRUDES	JENIS USAHA	STATUS		KLASIFIKASI BUMNAG
								AKTIF	TIDAK AKTIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SULIKI	KURAI	LERENG GUNUANG	PERNA NO. 12 TAHUN 2021	2015		Depot Air Minum	1	0	Tumbuh
2	SULIKI	SUNGAI RIMBANG	BATANG SINAMAR	PERNA NO. 42 TAHUN 2018	2018		Peternakan	1	0	Tumbuh
3	SULIKI	TANJUANG BUNGO	SAIYO SAKATO	PERNA NO. 4 TAHUN 2016	2016		Kios Nagari	1	0	Tumbuh
							Penyewaan Molen			
4	SULIKI	SULIKI	SULIKI JAYA	NO. 6 TAHUN 2016	2017		Kuliner	1	0	Dasar
							Ikan Segar			
							Bed Cover			
5	SULIKI	LIMBANANG	LIMBANANG	PERNA NO. 3 TAHUN 2018	2019			0	1	Dasar
6	SULIKI	ANDIANG	MEKAR JAYA	PERNA NO. 5 TAHUN 2017	2017			1	0	Dasar
7	GUGUAK	GUGUAK VIII KOTO	DELKO MANDIRI	NO. 6 TAHUN 2016	2016		Bank Mini	1	0	Dasar
8	GUGUAK	VII KOTO TALAGO	TUJUAH KOTO TALAGO MANDIRI	NO. 5 TAHUN 2017	2017		Budidaya Jagung	1	0	Dasar
9	GUGUAK	SUNGAI TALANG	BUMNAG SUNGAI TALANG	PERNA NO. 4 TAHUN 2016	2016		Coklat	0	1	Dasar

NO	KECAMATAN	NAGARI	NAMA BUMNAG	PERATURAN NAGARI	TAHUN PENDIRIAN	PRUDES	JENIS USAHA	STATUS		KLASIFIKASI BUMNAG
								AKTIF	TIDAK AKTIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	GUGUAK	KUBANG	7 NAN TUNGGGA	PERNA NO. 4 TAHUN 2017	2016		Budidaya Jagung	1	0	Dasar
11	GUGUAK	SIMPANG SUGIRAN	ZIGIRAN MANDIRI	NO. 3 TAHUN 2017	2017		Bank Mini	1	0	Tumbuh
							Pemipil Jagung			
							Buah Naga			
							Jasa Internet			
12	PAYAKUMBUH	KOTO BARU SIMALANGGANG	BUMNAG KOTO BARU SIMALANGGANG	NO. 4 TAHUN 2017	2017	Pegadaian		1	0	Tumbuh
13	PAYAKUMBUH	TAEH BUKIK	BUNGSU INDAH	NO. 3 TAHUN 2017	2017	Pariwisata		1	0	Dasar
14	PAYAKUMBUH	SIMALANGGANG	BUMNAG SIMALANGGANG	NO. 5 TAHUN 2017	2017	Perdagangan Dan Pertanian		1	0	Dasar
15	PAYAKUMBUH	SUNGAI BERINGIN	SUNGAI BIRINGIN	NO. 3 TAHUN 2017	2017	Pertanian Dan Perikanan		1	0	Tumbuh
16	PAYAKUMBUH	PIOBANG	PIOBANG JAYA	NO. 4 TAHUN 2017	2017	Pegang Gadai Wisata Alam		1	0	Tumbuh
17	PAYAKUMBUH	TAEH BARUAH	SEJAHTERA BERSAMA	NO. 5 TAHUN 2017	2017	Perdagangan Dan Pertanian		0	1	Dasar
18	PAYAKUMBUH	KOTO TANGAH SIMALANGGANG	BUMNAG KOTO TANGAH SIMALANGGANG	NO. 5 TAHUN 2017	2017	Pasar Nagari		1	0	Berkembang
19	LUAK	TJ. HARO SIKABU-KABU PD. PANJANG	SAGO SEJAHTERA	NO. 3 TAHUN 2017	2017	Pertanian	Jasa Keuangan	1	0	Tumbuh
							Fotokopi			
							Konveksi			
							Pertanian			
20	LUAK	MUNGO	MUNGO MEKAR MADANI	NO. 40 TAHUN 2016	2016	Perkebunan Sari Wangi	Perkebunan Sari Wangi	0	1	Dasar
21	LUAK	SUNGAI KAMUYANG	SUNGAI KAMUYANG	PERNAG NO. 05 TAHUN 2016	2016	Lembaga Keuangan Nagari (KMN)	Jsa Keuangan	1	0	Tumbuh
							KMN			
22	LUAK	ANDALEH	GAMANDJAYA ANDALEH	NO. 4 TAHUN 2017	2017	Bank Mini	Bank Mini	1	0	Dasar
23	HARAU	TARAM	SATO SAKAKI	NO. 4 TAHUN 2017	2017	LPN	LPN	1	0	Tumbuh
24	HARAU	SOLOK BIO BIO	SOBIO JAYA MANDIRI	PERNA NO. 5 TAHUN 2017	2017	Pertanian Organik Jasa Layanan Internet	Layanan Internet	1	0	Dasar
							Penjualan Gas LPG			
25	HARAU	TARANTANG	MAJU BERSAMA	NO. 4 TAHUN 2017	2017	Gas Subsidi		1	0	Dasar

NO	KECAMATAN	NAGARI	NAMA BUMNAG	PERATURAN NAGARI	TAHUN PENDIRIAN	PRUDES	JENIS USAHA	STATUS		KLASIFIKASI BUMNAG
								AKTIF	TIDAK AKTIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	HARAU	BUKIK LIMBUKU	AMANAHAH	PERNA NO. 3 TAHUN 2018	2018	Pertanian	Pertanian	1	0	Tumbuh
							Jasa Keuangan			
27	HARAU	HARAU	HARAU MANDIRI	PERNA NO. 3 TAHUN 2017	2017	Jasa Penyewaan	Jasa Penyewaan	1	0	Tumbuh
28	HARAU	BATU BALANG		PERNA NO. 2 TAHUN 2018	2018			0	1	Dasar
29	HARAU	SARILAMAK	SARILAMAK MANDIRI		2018		Perdagangan	1	0	Berkembang
30	HARAU	LUBUAK BATINGKOK	LUBUK TINGKOK	PERNAG NO. 10 TAHUN 2021	2021	Wisata Perkebunan	Destinasi Wisata	0	1	Dasar
							Perkebunan			
31	HARAU	PILUBANG	SALINGKA BUKIK	NO.2 TAHUN 2018	2018	Jual Sapropdi	Jual Sapropdi	1	0	Dasar
32	PANGKALAN KOTO BARU	GUNUANG MALINTANG	HARAPAN BASAMO	NO. 04 TAHUN 2018	2018	Dagang Gambir	Dagang Gambir	1	0	Tumbuh
33	KAPUR IX	MUARO PAITI	MUARO LESTARI	NO. 01 TAHUN 2018	2018	Gas Subsidi	Jual Beli Gas Subsidi	1	0	Dasar
34	KAPUR IX	KOTO BANGUN		NO. 3	2021	Desa Wisata		1	0	
35	KAPUR IX	KOTO LAMO	KOTO GAMBIR SEJAHTERA	NO. 05 TAHUN 2017	2017	Kebun Gambir	Peternakan Lele	0	1	Dasar
36	KAPUR IX	SIALANG	BUMNAG SIALANG	NO. 44 TAHUN 2018	2018			0	1	Dasar
37	KAPUR IX	GALUGUA	IKHLAS BERKARYA MAKMUR BERSAMA	NO. 05 TAHUN 2017	2017	Pamsimas, Pengumpul Produksi Pertanian Perkebunan		0	1	Dasar
38	GUNUANG OMEH	KOTOTINGGI	BUMNAG KOTOTINGGI	NO. 4 TAHUN 2017	2017			1	0	Tumbuh
39	GUNUANG OMEH	PANDAM GADANG	BUMNAG SARASO	NO. 4 THUN 2016	2016			1	0	Dasar
40	GUNUANG OMEH	TALANG ANAU	BUMANG SALEDANG ANAU	NO. 4 TAHUN 2017	2017			0	1	Dasar
41	LAREH SAGO HALABAN	LABUAH GUNUANG	BUMNAG LABUAH GUNUANG	NO. 04 TAHUN 2017	2017	Gula Semut		0	1	Tumbuh
42	LAREH SAGO HALABAN	BATU PAYUANG	BATU PAYUANG	PERNA NO. 4 TAHUN 2018	2018		Kuliner	0	1	Tumbuh
43	LAREH SAGO HALABAN	AMPALU	MANDIRI SEJAHTERA	NO. 83 TAHUN 2014	2014	Simpan Pinjam Jasa Keuangan	Serai Wangi	1	0	Dasar
44	LAREH SAGO HALABAN	BUKIK SIKUMPA	BUKIK SIKUMPA	PERNA NO. 4 TAHUN 2018	2019			0	1	Dasar

NO	KECAMATAN	NAGARI	NAMA BUMNAG	PERATURAN NAGARI	TAHUN PENDIRIAN	PRUDES	JENIS USAHA	STATUS		KLASIFIKASI BUMNAG
								AKTIF	TIDAK AKTIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	LAREH SAGO HALABAN	BALAI PANJANG	BALAI PANJANG	NO. 8 TAHUN 2018	2018	Kebun Sereai Wangi		1	0	Tumbuh
46	LAREH SAGO HALABAN	HALABAN	HALABAN TERPADU	NO. 3 TAHUN 2017	2017	Pengerajin Songket		1	0	Tumbuh
47	LAREH SAGO HALABAN	TANJUANG GADANG	TANJUNG GADANG BERSATU	NO. 9 TAHUN 2017	2017	Kasium / Dolomit		1	0	Tumbuh
48	LAREH SAGO HALABAN	SITANANG	SITANANG	PERNA NO. 4 TAHUN 2018	2018			0	1	Dasar
49	SITUJUAH LIMO NAGARI	SITUJUAH BATUA	SITUJUAH BATUA MANDIRI	PERNA NO. 3 TAHUN 2017	2018		Perdagangan	1	0	Tumbuh
50	SITUJUAH LIMO NAGARI	TUNGKA	TUNGKAR MANDIRI SEJAHTERA	PERNA NO. 3 TAHUN 2018	2018			0	1	Dasar
51	SITUJUAH LIMO NAGARI	SITUJUAH BANDA DALAM	BERINGIN SAKTI	NO. 3 TAHUN 2017	2017	Perdagangan		1	0	Tumbuh
52	SITUJUAH LIMO NAGARI	SITUJUAH GADANG	SITUJUAH GADANG	PERNA NO. 3 TAHUN 2017	2017			0	1	Dasar
53	MUNGKA	JOPANG MANGANTI	JOPANG MANGANTI	PERNA NO. TAHUN 2017	2012			0	1	Dasar
54	MUNGKA	SIMPANG KAPUAK	LUBUAK BULAN PERDANA	NO. 6 TAHUN 2017	2017			1	0	Dasar
55	MUNGKA	MUNGKA	MUNGKA	NO. 9 TAHUN 2017	2017	Perdagangan		1	0	Dasar
56	MUNGKA	SUNGAI ANTUAN	NASYA MANDIRI	NO. 9 TAHUN 2017	2017			1	0	Dasar
57	BUKIK BARISAN	MAEK	ZULKARNAIK	NO. 4 TH 2017	2017	Pemasaran Pupuk		1	0	Dasar
58	BUKIK BARISAN	BANJA LOWEH	BANJAR SAKATO	NO. 5 TH 2018	2018	Peternakan Sapi		1	0	Dasar
59	BUKIK BARISAN	BARUAH GUNUANG	BARUAH GUNUNG	PERNA NO.3 TH 2019	2019			0	1	Dasar
60	BUKIK BARISAN	SUNGAI NANIANG	LIMO SAIYO	NO. 5 TH 2017	2017	Distributor Gas		1	0	Dasar
61	BUKIK BARISAN	KOTO TANGAH	PALO DAREK	NO. 4 TAHUN 2017	2017	Bank Mini ATK Dan Photocopy		1	0	Dasar
62	AKABILURU	SARIAK LAWEH	PALITO NAGARI	PERNA NO. 4 TAHUN 2017	2017	Trading Financial Bisnis Foto Copy		1	0	Dasar
63	AKABILURU	KOTO TANGAH BATU AMPA	ONAM SIDANG	PERNA NO. 5 TAHUN 2018	2017	Peternakan Kambing		0	1	Dasar
64	AKABILURU	BATUHAMPAR	TALAGO MANARO	NO. . TAHUN 2017	2017	Peternakan Kambing, Pembibitan		1	0	Dasar

NO	KECAMATAN	NAGARI	NAMA BUMNAG	PERATURAN NAGARI	TAHUN PENDIRIAN	PRUDES	JENIS USAHA	STATUS		KLASIFIKASI BUMNAG
								AKTIF	TIDAK AKTIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	AKABILURU	SUAYAN	NAGARI SUAYAN SASUAI	PERNA NO. 5 TAHUN 2017	2017		Foto Copy, ATK, Bank Mini	1	0	Dasar
66	AKABILURU	SUNGAI BALANTIAK	RAUDHATUL HASANAH	NO. 4 TAHUN 2017	2017		Bank Mini BNI, Barang Harian	0	1	Dasar
67	AKABILURU	PAUH SANGIK	PAUH SANGIK SEJAHTERA	PERNA NO. 3 TAHUN 2017	2017		Perikanan	1	0	Dasar
68	AKABILURU	DURIAN GADANG	DURIAN GADANG BUANA MANDIRI	NO. 5 TAHUN 2017	2017		Percetakan	1	0	Dasar
								48	20	

Sumber: Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD/N, 2021.

Pada Gambar 3.4 dapat dilihat perkembangan Badan Usaha Milik Nagari Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021. Secara persentase pada Tahun 2020-2021, terjadi penurunan persentase BumNag aktif. Pencapaian tertinggi pada Tahun 2019, sebesar 89%. Jumlah BumNag aktif tahun 2021 menurun dari tahun 2019, akan tetapi meningkat dari Tahun 2020. Jumlah BumNag aktif Tahun 2021 adalah 48 dari 68 BumNag yang terbentuk. Sebagai perbandingan Data perkembangan jumlah BUMNag Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Gambar 3.4
PERKEMBANGAN STATUS BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG)
KAB. LIMA PULUH KOTA TAHUN 2017 - 2021



Tabel 3.11
DATA PERKEMBANGAN BADAN USAHA MILIK NAGARI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2017-2021

TAHUN	JUMLAH BUMNAG			PERSENTASE BUMNAG AKTIF
	AKTIF	TIDAK AKTIF	TOTAL	
1	2	3	3	4
2017	27	9	36	75%
2018	42	10	52	81%
2019	54	7	61	89%
2020	47	13	60	78%
2021	48	20	68	71%

Sumber: Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD/N, 2021.

Dilihat dari sisi jumlah terdapat peningkatan jumlah BUMNag yang terbentuk dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2021 jumlah BumNag aktif adalah 48 dari 68 BumNag yang terbentuk, dengan tingkat capaian 71%. Meningkat dari Tahun 2020, sebesar 60 BumNag. Pencapaian pada Tahun 2019 adalah sebanyak 54 BumNag aktif dari 61 BumNag yang terbentuk. Jika dipersentasekan yaitu sebesar 89% dari keseluruhan BumNag. Pada Tahun 2017, jumlah BumNag yang aktif adalah 27 dari 36 BumNag yang terbentuk. Pencapaiannya adalah sebesar 75%. Sedangkan pada Tahun 2018, terdapat 42 BumNag yang aktif dari 52 BumNag yang terbentuk dengan pencapaian sebesar 81%.

Terdapat 20 BumNag yang tidak aktif yang tersebar di 12 Kecamatan. Kegiatan BumNag telah berkembang, menyebar secara merata dan terlaksana secara aktif pada 13 Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jenis usaha yang dilaksanakan antara lain: kegiatan perdagangan, pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, percetakan, pariwisata, jasa keuangan (bank mini), dan usaha jasa lainnya. Nagari yang belum membentuk BumNag sebanyak 11 Nagari yaitu :

- a. Kecamatan Harau : Nagari Gurun dan Koto Tuo.
- b. Kecamatan Situjuh Limo Nagari : Nagari Situjuh Ladang Laweh.

- c. Kecamatan Mungka : Nagari Talang Maur.
- d. Kecamatan Pangkalan Koto Baru : Nagari Manggilang, Tanjung Baliak, Pangkalan, Koto Alam, Tanjung Pauh.
- e. Kecamatan Kapur IX : Nagari Lubuak Alai dan Durian Tinggi.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembinaan terhadap Bumrag di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain:

- Belum optimalnya pembinaan peningkatan kapasitas terhadap Bumrag yang disebabkan oleh keterbatasan tenaga dan dukungan dana. Kegiatan pembinaan yang telah terlaksana adalah pelatihan satu hari terhadap Bumrag. Sedangkan idealnya, kegiatan pembinaan yang dibutuhkan adalah berupa bimbingan teknis (pelatihan yang bersifat teknis) dengan waktu 3 (tiga) hari.
- Masih terdapat 11 Nagari yang belum membentuk Bumrag, yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman lembaga yang ada di Nagari tentang pentingnya keberadaan Bumrag.
- Belum terealisasinya kegiatan penyertaan modal oleh Wali Nagari (komisaris) kepada pengelola Bumrag.
- Masih terdapat SDM pengelola Bumrag yang lemah secara kualitas, mulai dari tahap perencanaan sampai operasionalnya (output).

b) Persentase Lembaga Sosial Kemasyarakatan Yang Aktif

Indikator kinerja kedua pada sasaran strategis ke-2 adalah persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif. Data yang digunakan untuk mengukur persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif adalah:

- (1) Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) aktif: jumlah LPM yang aktif selama Tahun 2021 dibandingkan dengan total LPM.
- (2) Persentase KP-SPAMS aktif: jumlah KP-SPAMS aktif selama Tahun 2021 dibandingkan dengan total KP-SPAMS.
- (3) Persentase PKK aktif: jumlah kelompok PKK aktif selama Tahun

2021 dibandingkan dengan total kelompok PKK.

- (4) Persentase Posyandu aktif: jumlah kelompok Posyandu aktif selama Tahun 2021 dibandingkan dengan total kelompok Posyandu.
- (5) Persentase Kader Pembangunan Manusia (KPM) aktif: jumlah kelompok KPM aktif selama Tahun 2021 dibandingkan dengan total kelompok KPM.

Hasil Pengukuran

Tabel 3.12
HASIL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA
PERSENTASE LEMBAGA SOSIAL KEMASYARAKATAN YANG AKTIF

INDIKATOR	JUMLAH KELOMPOK AKTIF	PERSENTASE
LPM Aktif tahun 2021	79	100%
KP-SPAMS Aktif tahun 2021	153	100%
PKK Aktif tahun 2021	93	100%
Posyandu Aktif tahun 2021	557	100%
KPM Aktif tahun 2021	95	100%
Rata-rata Persentase		100%

Sumber: Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota, 2021.

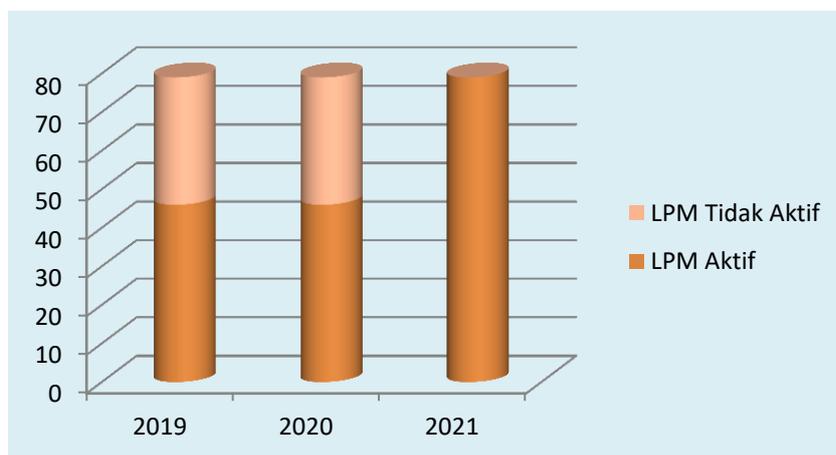
- (1) Persentase LPM aktif : (%) = $\frac{LPM\ Aktif}{Total\ LPM} = \frac{79}{79} = 100\%$
- (2) Persentase KP-SPAMS aktif: (%) = $\frac{KP-SPAMS\ Aktif}{Total\ KP-SPAMS} = \frac{153}{153} = 100\%$
- (3) Persentase PKK aktif : (%) = $\frac{PKK\ Aktif}{Total\ PKK} = \frac{93}{93} = 100\%$
- (4) Persentase Posyandu aktif : (%) = $\frac{Posyandu\ Aktif}{Total\ Posyandu} = \frac{557}{557} = 100\%$
- (5) Persentase KPM aktif : (%) = $\frac{KPM\ Aktif}{Total\ KPM} = \frac{95}{95} = 100\%$

LPM Aktif

Pada tahun 2021, terdapat 79 LPM Nagari yang aktif. Dengan jumlah ini berarti **100%** LPM aktif dibandingkan keseluruhan jumlah LPM (79 LPM). Terjadi peningkatan jumlah LPM aktif pada tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya dengan jumlah 46 LPM. Pada tahun

2021, pembinaan LPM secara langsung mulai bisa dilaksanakan karena pembatasan kegiatan masyarakat karena *Covid-19* mulai dikurangi.

Gambar 3.5
PERKEMBANGAN STATUS LPM NAGARI
KAB. LIMA PULUH KOTA TAHUN 2019 - 2021



Secara umum seluruh kelembagaan LPM sudah aktif, namun belum berfungsi secara optimal. Permasalahan yang dihadapi oleh LPM diantaranya, masih belum dilibatkannya LPM dalam berbagai musyawarah di tingkat nagari. Selain itu kegiatan LPM masih belum dianggarkan dalam APBNagari, sehingga LPM tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Sedangkan dari sisi DPMD/N, kendala yang dihadapi adalah belum optimalnya pelaksanaan Bimbingan Teknis/Pelatihan untuk LPM beserta kader-kadernya karena keterbatasan pada anggaran. Kegiatan yang telah dilakukan lebih berbentuk sosialisasi (pelatihan satu hari), yang belum dapat diaplikasikan secara maksimal oleh LPM dan kader-kadernya. Sementara untuk pembinaan terhadap LPM ini, dibutuhkan kegiatan berupa pelatihan yang bersifat teknis dengan durasi waktu yang lebih lama.

KP-SPAMS Aktif

KP-SPAMS (Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi) merupakan salah satu pihak yang bertugas melakukan pengelolaan keberlanjutan di tingkat masyarakat untuk menjamin

Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) yang dibangun Pamsimas tetap terpelihara. Sehingga mampu memberikan dan meningkatkan jangkauan pelayanan air minum dan sanitasi. Pengelolaan keberlanjutan SPAMS yang dilakukan oleh KP-SPAMS sesuai dengan AD/ART yang ditetapkan.

Pada tahun 2021, di Kabupaten Lima Puluh Kota telah terbentuk 153 KP-SPAMS yang tersebar di 13 Kecamatan. Pada tahun 2020, terbentuk 124 KP-SPAMS. Terjadi penambahan 29 KP-SPAMS pada Tahun 2021. Seluruh KP-SPAMS ini aktif melakukan pengelolaan dan pemeliharaan dari sistem penyediaan air minum dan sanitasi yang telah dibangun oleh Pamsimas. Data lengkap KP-SPAMS Kab. Lima Puluh Kota disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13
REKAPITULASI DATA KP-SPAMS
KAB. LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020-2021

No.	Kecamatan	Jumlah KP-SPAMS	
		2020	2021
1	2	3	4
1	Lareh Sago Halaban	24	26
2	Luak	2	5
3	Bukik Barisan	14	16
4	Guguak	7	9
5	Kapur IX	8	10
6	Pangkalan Koto Baru	10	15
7	Gunuang Omeh	12	16
8	Akabiluru	11	13
9	Harau	4	8
10	Situjuah Limo Nagari	5	7
11	Suliki	12	12
12	Mungka	11	11
13	Payakumbuh	4	5
Total		124	153

Sumber: Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota, 2021.

PKK Aktif

Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021, berjumlah 93 kelompok. Data TP-PKK Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.14. Seluruh kelompok TP-PKK berstatus aktif pada

tahun Anggaran 2021 ini. TP-PKK terdiri atas, 1 TP-PKK Kabupaten, 13 TP-PKK Kecamatan dan 79 TP-PKK Nagari, dengan total 93 kelompok TP-PKK.

Tabel 3.14
PKK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2021

No	Kabupaten/ Kecamatan	Jumlah TP-PKK			Status	
		Kabupaten	Kecamatan	Nagari	Aktif	Pasif
1	2	3	4	5	6	7
1	Suliki		1	6	7	0
2	Guguak		1	5	6	0
3	Payakumbuh		1	7	8	0
4	Luak		1	4	5	0
5	Harau		1	11	12	0
6	Mungka		1	5	6	0
7	Lareh Sago halaban		1	8	9	0
8	Gunuang Omeh		1	3	4	0
9	Akabiluru		1	7	8	0
10	Situjuah Limo Nagari		1	5	6	0
11	Bukik Barisan		1	5	6	0
12	Kapur IX		1	7	8	0
13	Pangkalan		1	6	7	0
14	Lima Puluh Kota	1			1	0
Jumlah		1	13	79	93	0

Sumber: Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota, 2021.

Gambar 3.6
KEGIATAN TIM PENGGERAK - PKK
KAB. LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021



Sumber: Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota, 2021.

TP-PKK di Kabupaten, Kecamatan dan Nagari aktif melakukan kegiatan selama tahun 2021. Diantaranya Rakerda PKK ke-IX,

Pelantikan TP-PKK 2021-2024, Peringatan HKG ke-49 dan Penganjangan Bunda Cekatan, Jambore Kader PKK Berprestasi ke XVIII tingkat Prov. Sumbar, Bimtek peningkatan Kapasitas Pengurus PKK se Kab. Lima Puluh Kota, Lomba Dasawisma Berprestasi Tingkat Kabupaten, Lomba Nagari/Kecamatan Binaan Gerak PKK tahun 2021. Beberapa dokumentasi kegiatan TP-PKK disajikan pada Gambar 3.6.

Posyandu Aktif

Data Posyandu Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2021 sama dengan Tahun 2020, dapat dilihat pada Tabel 3.15. Jumlah Posyandu di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 557 Posyandu dengan jumlah kader aktif sebanyak 2.755 kader. Seluruh Posyandu ini aktif melakukan berbagai kegiatan. Salah satu bentuk kegiatan Posyandu bersama TP-PKK adalah Temu Kader Posyandu Berprestasi Tingkat Provinsi Sumbar Tahun 2021 di Padang(Gambar 3.7).

Tabel 3.15
DATA POSYANDU
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021

No	Kecamatan	Jumlah Posyandu
1	2	3
1	Suliki	37
2	Guguak	57
3	Payakumbuh	54
4	Luak	38
5	Harau	63
6	Mungka	33
7	Lareh Sago halaban	57
8	Gunuang Omeh	26
9	Akabiluru	39
10	Situjuah Limo Nagari	30
11	Bukik Barisan	47
12	Kapur IX	34
13	Pangkalan	42
Jumlah		557

Sumber: Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota, 2021.

Gambar 3.7
KEGIATAN TIM PENGGERAK – PKK , POSYANDU
KAB. LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021



Sumber: Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota, 2021

Berdasarkan strata/pengelompokannya, Posyandu di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada Tabel 3.16. Posyandu dibagi atas 4 strata yaitu: mandiri, purnama, madya dan pratama.

Tabel 3.16
DATA STRATA POSYANDU
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021

No	Strata Posyandu	2021	
		Jumlah	Persentase
1	Mandiri	68	12%
2	Purnama	263	47%
3	Madya	218	39%
4	Pratama	8	1%
Jumlah		557	100%

Sumber: Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota, 2021.

Kader Pembangunan Manusia (KPM) Aktif

Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah warga masyarakat Nagari yang dipilih melalui musyawarah Nagari untuk bekerja membantu pemerintah Nagari dalam memfasilitasi masyarakat Nagari dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumberdaya manusia di Nagari. KPM adalah bagian dari kader desa yang mendapat tugas khusus terkait dengan “Program

Konvergensi Pencegahan Stunting”. Sebagai pedoman kerja KPM, Kementerian Desa telah menerbitkan buku Panduan Umum Kader Pembangunan manusia.

Dalam lingkup Kabupaten, KPM diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Peran Nagari dalam Konvergensi Pencegahan Stunting di kabupaten Lima Puluh Kota. Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan kepada DPMD/N selaku OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk memberikan pembinaan kepada KPM melalui pemerintah desa/nagari. Bersama dengan Pendamping Nagari, KPM memfasilitasi Pemerintahan Nagari, Bamus dan masyarakat untuk membentuk Rumah Desa Sehat (RDS). Kegiatan Bimtek/Workshop terkait KPM and RDS dapat dilihat pada Gambar 3.8.

Gambar 3.8
Bimtek/Workshop Kader Pembangunan Manusia (KPM)
dan Rumah Desa Sehat (RDS) Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2021



Sumber: Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota, 2020

Pada Tahun 2021 jumlah KPM Kab. Lima Puluh Kota sebanyak 95 KPM untuk 79 Nagari, meningkat dari Tahun sebelumnya dengan jumlah 94 KPM. KPM sudah tersebar pada 13 Kecamatan di Kabupaten. Rekapitulasi KPM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 disajikan pada tabel 3.17.

Tabel 3.17
REKAPITULASI KPM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020-2021

No	Kecamatan	Jumlah KPM yang Dialokasikan	
		2020	2021
1	Suliki	6	6
2	Guguak	5	5
3	Payakumbuh	7	7
4	Luak	5	5
5	Harau	14	14
6	Pangkalan	8	8
7	Kapur IX	7	7
8	Gunuang Omeh	4	4
9	Lareh Sago Halaban	8	8
10	Situjuah Limo Nagari	5	5
11	Mungka	12	12
12	Bukik Barisan	5	6
13	Akabiluru	8	8
Total		94	95

Sumber: Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota, 2021.

Secara keseluruhan pencapaian indikator kinerja pada Tahun 2021, dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3.18. Dari 4 indikator kinerja, satu indikator belum mencapai target yaitu persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif. Namun menurut kriteria penilaian dalam pencapaian kinerja, sudah menunjukkan kriteria tinggi. Sehingga secara umum, pencapaian indikator kinerja menunjukkan pencapaian yang sangat baik. Dan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan.

Tabel 3.18
PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN
SASARAN STRATEGIS TAHUN 2018-2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				CAPAIAN			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa/Nagari	Persentase Nagari yang berkinerja Baik (Predikat A, RKP, APBD/N dan LKPJ Tepat Waktu)	-	-	78%	93%	-	-	104%	101%
	Persentase Nagari yang memiliki Nilai Perkembangan Nagari diatas 300	95%	95%	100%	100%	-	-	106%	106%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				CAPAIAN			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Berdasarkan Evaluasi Perkembangan Nagari								
Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang Aktif	81%	89%	78%	71%	-	-	87%	101%
	Persentase Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang Aktif	-	-	92%	100%	-	-	106%	105%

Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja pada Tahun 2021 ini, didukung oleh 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan 4 Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dengan realisasi sebesar **Rp. 4.369.934.842,-** dari anggaran **Rp. 4,538,751,558,-** atau **96,28%**. Datanya disajikan pada Tabel 3.19 dibawah ini.

Tabel 3.19
PROGRAM URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
UNTUK MENCAPAI SASARAN STRATEGIS TAHUN 2021

PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,245,653,358	3,118,236,042	127,417,316	96.07%
Program Penataan Desa	30,639,200	30,634,200	5,000	99.98%
Program Peningkatan Kerja Sama Desa	3,345,100	3,245,000	100,100	97.01%
Program Administrasi Pemerintahan Desa	507,547,300	487,324,800	20,222,500	96.02%
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	751,566,600	730,494,800	21,071,800	97.20%
JUMLAH	4,538,751,558	4,369,934,842	168,816,716	96.28%

Dalam mencapai target kinerja Tahun 2021 DPMDN menghadapi kendala-kendala namun masih dapat ditanggulangi, sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai. Target yang belum

tercapai adalah persentase lembaga ekonomi masyarakat aktif. Secara umum kendala yang dihadapi adalah :

1. Belum optimalnya pembinaan peningkatan kapasitas terhadap Bumrag yang disebabkan oleh keterbatasan tenaga dan dukungan dana. Sementara pemahaman lembaga yang ada di Nagari tentang pentingnya keberadaan Bumrag masih rendah. Selain itu kualitas SDM pengelola Bumrag masih rendah.
2. Belum terealisasinya kegiatan penyertaan modal oleh Wali Nagari (komisaris) kepada pengelola Bumrag.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah:

1. Pembinaan terhadap Lembaga Bumrag yang sudah ada, dalam bentuk peningkatan kapasitas pengurus Bumrag sehingga status perkembangan Bumrag dapat meningkat. Bumrag yang ada di Nagari dapat menjadi lembaga ekonomi berkualitas yang dapat membantu menggerakkan ekonomi masyarakat.
2. Pembinaan terhadap Aparatur pemerintahan Nagari, Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Nagari dan Masyarakat tentang peran penting Bumrag untuk peningkatan potensi ekonomi Nagari.

D. ANALISIS EFISIENSI

Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis pada Tahun 2021, DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota telah mampu mengefisienkan sumber daya yang digunakan. Dari sisi anggaran terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp. 168.816.716,-. Realisasi fisik program dan kegiatan Tahun 2021 sebesar **99,59%** dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar **96,28%**. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran tahun 2020 sebesar 3.31%. Selengkapnya data realisasi anggaran dan fisik DPMD/N Tahun 2021 pada Tabel 3.20. Efisiensi anggaran terlaksana pada 5 program Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya dari 45 sub kegiatan yang dilaksanakan, efisiensi terlaksana pada semua sub kegiatan.

Tabel 3.20
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN DPMD/N TAHUN 2021

1	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DPA PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN		KET.
				KEUANGAN	FISIK	
1	2	3	4	5	6	7
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,245,653,358	3,118,236,042	96.07%	100%	Efisien
I	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104,211,400	102,098,500	96.07%	100%	Efisien
1	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	20,448,000	20,321,000	99.38%	100%	Efisien
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	21,932,000	21,287,000	97.06%	100%	Efisien
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	7,068,000	6,873,000	97.24%	100%	Efisien
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DKA SKPD	4,033,000	3,339,000	82.79%	100%	Efisien
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	4,320,000	4,309,000	99.75%	100%	Efisien
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35,605,400	35,306,500	99.16%	100%	Efisien
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,805,000	10,663,000	98.69%	100%	Efisien
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,604,872,258	2,537,780,473	97.42%	100%	Efisien
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,592,168,258	2,525,193,473	97.42%	100%	Efisien
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7,986,000	7,964,000	99.72%	100%	Efisien
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	4,718,000	4,623,000	97.99%	100%	Efisien
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4,957,700	2,707,000	54.60%	100%	Efisien
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	4,957,700	2,707,000	54.60%	100%	Efisien
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	149,848,800	123,919,100	82.70%	100%	Efisien
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,081,000	2,078,000	99.86%	100%	Efisien
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,600,000	2,600,000	100.00%	100%	Efisien

PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DPA PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN		KET.	
			KEUANGAN	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20,801,300	17,549,200	84.37%	100%	Efisien
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,671,500	7,117,700	48.51%	100%	Efisien
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19,200,000	9,295,000	48.41%	100%	Efisien
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90,495,000	85,279,200	94.24%	100%	Efisien
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	172,544,000	152,650,051	88.47%	100%	Efisien
3	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,170,000	1,163,000	99.40%	100%	Efisien
4	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	43,404,000	25,407,051	58.54%	100%	Efisien
5	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,140,000	4,250,000	69.22%	100%	Efisien
6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	121,830,000	121,830,000	100.00%	100%	Efisien
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209,219,200	199,080,918	95.15%	100%	Efisien
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	189,665,000	181,143,873	95.51%	100%	Efisien
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	954,200	603,000	63.19%	100%	Efisien
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18,600,000	17,334,045	93.19%	100%	Efisien
B	PROGRAM PENATAAN DESA	30,639,200	30,634,200	99.98%	100%	Efisien
I.	Penyelenggaraan Penataan Desa	30,639,200	30,634,200	99.98%	100%	Efisien
1	Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	30,639,200	30,634,200	99.98%	100%	Efisien
C	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	3,345,100	3,245,000	97.01%	99.84%	Efisien
I.	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	3,345,100	3,245,000	97.01%	99.84%	Efisien
1	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2,870,000	2,775,000	96.69%	100%	Efisien
2	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	475,100	470,000	98.93%	98.93%	Efisien
D	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	507,547,300	487,324,800	96.02%	97.26%	Efisien
I.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	507,547,300	487,324,800	96.02%	97.26%	Efisien

PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DPA PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN		KET.	
			KEUANGAN	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7
1	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	52,370,600	44,655,000	85.27%	85.27%	Efisien
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	51,052,500	49,702,000	97.35%	100%	Efisien
3	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	129,596,000	124,838,500	96.33%	100%	Efisien
4	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	31,005,800	30,847,400	99.49%	100%	Efisien
5	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	7,205,000	7,200,000	99.93%	100%	Efisien
6	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama Antar Desa	35,272,600	32,492,400	92.12%	92.12%	Efisien
7	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1,435,000	1,430,000	99.65%	99.65%	Efisien
8	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	4,220,000	4,220,000	100.00%	100%	Efisien
9	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	50,236,500	46,848,000	93.25%	93.25%	Efisien
10	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	41,062,500	41,017,500	99.89%	100%	Efisien
11	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	26,720,900	26,710,000	99.96%	100%	Efisien
12	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Laporan Desa dan Kelurahan	77,369,900	77,364,000	99.99%	100%	Efisien
E	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	751,566,600	730,494,800	97.20%	99.40%	Efisien
I	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	751,566,600	730,494,800	97.20%	99.40%	Efisien
1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	6,802,900	6,777,900	99.63%	100%	Efisien
2	Fasilitasi Penataan Pemberdayaan Pendayagunaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	164,501,500	162,455,000	98.76%	100%	Efisien

PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DPA PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN		KET.	
			KEUANGAN	FISIK		
1	2	3	4	5	6	7
3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	53,765,500	52,887,500	98.37%	100%	Efisien
4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	46,167,800	45,238,800	97.99%	100%	Efisien
5	Fasilitasi BBGRM	55,207,000	50,760,000	91.94%	91.93%	Efisien
6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	425,121,900	412,375,600	97.00%	100%	Efisien
TOTAL		4,538,751,558	4,369,934,842	96.28%	99.59%	

Sedangkan dari sisi sumber daya manusia, dengan jumlah pegawai sebanyak 44 orang (ASN dan non ASN). Secara umum, seluruh pegawai DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota telah memberikan kontribusi dan dukungan kerja dengan penuh tanggung jawab dan loyalitas. Sehingga tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dapat dicapai dengan sangat baik.

E. REALISASI ANGGARAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) yang melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat. Tahun 2021 DPMD/N melaksanakan 5 Program dengan 45 Kegiatan, menggunakan sumber dana APBD 2021, alokasi anggaran yaitu **Rp. 4.538.751.558.-** dan realisasinya yaitu **Rp. 4.369.934.842.-** dengan rincian seperti pada Tabel 3.21.

Tabel. 3.21
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) TAHUN 2021
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

NO. REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
5	BELANJA	4,538,751,558	4,369,934,842	96.28%
5.1	BELANJA OPERASI	4,538,751,558	4,369,934,842	96.28%
5.1.01	Belanja Pegawai	2,564,572,098	2,503,612,523	97.62%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,854,179,460	1,746,322,319	94.18%
5.1.05	Belanja Hibah	120,000,000	120,000,000	100.00%
5.2	Belanja Modal	-	-	-
5.2.2	Belanja Modal	-	-	-

Realisasi Belanja Langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun Anggaran 2021 secara terinci berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan, diuraikan pada Tabel 3.22 berikut ini.

Tabel 3.22
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN DPMD/N TAHUN 2021

PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DPA AWAL (Rp)	DPA PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp.)	%	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,087,422,485	3,245,653,358	3,118,236,042	96.07%
I	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	127,376,700	104,211,400	102,098,500	96.07%
1	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	35,620,400	20,448,000	20,321,000	99.38%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	25,242,000	21,932,000	21,287,000	97.06%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	7,348,300	7,068,000	6,873,000	97.24%
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DKA SKPD	8,506,000	4,033,000	3,339,000	82.79%
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	7,508,000	4,320,000	4,309,000	99.75%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30,700,000	35,605,400	35,306,500	99.16%

PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN		DPA AWAL (RP)	DPA PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	3	4	6
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,452,000	10,805,000	10,663,000	98.69%
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,716,093,285	2,604,872,258	2,537,780,473	97.42%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,701,032,285	2,592,168,258	2,525,193,473	97.42%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7,986,000	7,986,000	7,964,000	99.72%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	7,075,000	4,718,000	4,623,000	97.99%
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9,287,700	4,957,700	2,707,000	54.60%
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	9,287,700	4,957,700	2,707,000	54.60%
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	288,928,600	149,848,800	123,919,100	82.70%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,478,000	2,081,000	2,078,000	99.86%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,500,000	2,600,000	2,600,000	100.00%
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13,000,000	-	-	-
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25,334,100	20,801,300	17,549,200	84.37%
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,673,500	14,671,500	7,117,700	48.51%
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	31,100,000	19,200,000	9,295,000	48.41%
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196,843,000	90,495,000	85,279,200	94.24%
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	429,875,000	-	-	-
1	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	370,875,000	-	-	-
2	Pengadaan Mebel	14,000,000	-	-	-
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45,000,000	-	-	-
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	179,684,000	172,544,000	152,650,051	88.47%
3	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,960,000	1,170,000	1,163,000	99.40%

PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN		DPA AWAL (RP)	DPA PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	3	4	6
4	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	43,404,000	43,404,000	25,407,051	58.54%
5	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,480,000	6,140,000	4,250,000	69.22%
6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	123,840,000	121,830,000	121,830,000	100.00%
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	336,177,200	209,219,200	199,080,918	95.15%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	290,955,000	189,665,000	181,143,873	95.51%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	954,200	954,200	603,000	63.19%
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44,268,000	18,600,000	17,334,045	93.19%
B	PROGRAM PENATAAN DESA	71,138,600	30,639,200	30,634,200	99.98%
I.	Penyelenggaraan Penataan Desa	71,138,600	30,639,200	30,634,200	99.98%
1	Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	71,138,600	30,639,200	30,634,200	99.98%
C	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	23,930,100	3,345,100	3,245,000	97.01%
I.	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	23,930,100	3,345,100	3,245,000	97.01%
1	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	11,610,000	2,870,000	2,775,000	96.69%
2	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	12,320,100	475,100	470,000	98.93%
D	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	678,363,900	507,547,300	487,324,800	96.02%
I.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	678,363,900	507,547,300	487,324,800	96.02%
1	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	93,433,300	52,370,600	44,655,000	85.27%
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	77,432,100	51,052,500	49,702,000	97.35%
3	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	86,631,000	129,596,000	124,838,500	96.33%
4	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	51,230,700	31,005,800	30,847,400	99.49%
5	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	27,525,000	7,205,000	7,200,000	99.93%
6	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama Antar Desa	46,557,600	35,272,600	32,492,400	92.12%
7	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	45,765,000	1,435,000	1,430,000	99.65%
8	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	12,925,300	4,220,000	4,220,000	100.00%

PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN		DPA AWAL (RP)	DPA PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	3	4	6
9	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	69,149,500	50,236,500	46,848,000	93.25%
10	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	45,287,500	41,062,500	41,017,500	99.89%
11	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	40,983,300	26,720,900	26,710,000	99.96%
12	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Laporan Desa dan Kelurahan	81,443,600	77,369,900	77,364,000	99.99%
E	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	869,331,200	751,566,600	730,494,800	97.20%
I	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	869,331,200	751,566,600	730,494,800	97.20%
1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	16,690,200	6,802,900	6,777,900	99.63%
2	Fasilitasi Penataan Pemberdayaan Pendayagunaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	269,848,400	164,501,500	162,455,000	98.76%
3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	80,975,600	53,765,500	52,887,500	98.37%
4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	92,991,400	46,167,800	45,238,800	97.99%
5	Fasilitasi BBGRM	96,535,800	55,207,000	50,760,000	91.94%
6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	312,289,800	425,121,900	412,375,600	97.00%
	TOTAL	5,730,186,285	4,538,751,558	4,369,934,842	96.28%

F. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI AKIP TERHADAP REVIEW LKjIP DPMD/N TAHUN 2020

Berdasarkan laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) DPMDN terhadap LKjIP Tahun 2020 diperoleh nilai 65,85 dengan kategori **Baik** atau **B**. Penilaian untuk masing-masing aspek antara lain:

- a) Perencanaan kinerja: 23,60 (Bobot 30%)
- b) Pengukuran kinerja: 14,69 (Bobot 25%)
- c) Pelaporan kinerja: 10,42 (Bobot 15%)
- d) Evaluasi internal: 2,05 (Bobot 10%)
- e) Pencapaian sasaran/kinerja organisasi: 15,10 (Bobot 20%)

Terdapat beberapa rekomendasi pada aspek : perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal. Sedangkan Tindak lanjut yang telah dilakukan terhadap rekomendasi tersebut adalah:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Indikator kinerja sasaran telah diperbaiki sehingga memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.
- b. Program/kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil telah disempurnakan.
- c. Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta telah dilakukan review secara berkala.
- d. Rencana Aksi telah mencantumkan target secara lengkap.
- e. Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan kinerja sampai pada tingkat eselon III dan IV.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Mekanisme pengumpulan data kinerja telah dilakukan secara optimal, valid dan akurat sehingga dapat diandalkan.
- b. IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.
- c. IKU telah direview secara berkala.
- d. Pengukuran kinerja telah digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Laporan kinerja telah menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

- b. Informasi kinerja menggunakan data yang valid dan akurat, dengan analisis yang tajam, sehingga menjadi data yang dapat diandalkan dalam memberikan informasi.
 - c. Informasi kinerja telah digunakan dalam perbaikan perencanaan program dan kegiatan untuk peningkatan kinerja.
4. Evaluasi Internal
- a. Telah dilakukan pemantauan terhadap pencapaian kinerja dan hambatan-hambatannya.
 - b. Evaluasi program dan rencana aksi telah dilaksanakan untuk mencapai peningkatan kinerja.
 - c. Evaluasi dan pengendalian terhadap pencapaian indikator kinerja telah disampaikan dan dikomunikasikan dalam bentuk laporan triwulan yang dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan (Bapelitbang) Kabupaten Lima Puluh Kota.

Prestasi/penghargaan yang dicapai DPMD/N Kab. Lima Puluh Kota selama Tahun Anggaran 2021 di tingkat provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- a) Pencapaian Key Performance Indicator (KPI) Terbaik II – Pamsimas 2021 – Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b) Fasilitator Pendamping Terbaik I – Pamsimas 2021 (FM WSS).
- c) Fasilitator Pendamping Terbaik II – Pamsimas 2021 (FM WSS).
- d) Fasilitator Pendamping Terbaik I – Pamsimas 2021 (FM CD).
- e) Fasilitator Pendamping Terbaik II – Pamsimas 2021 (FM CD).
- f) Fasilitator Pendamping Terbaik III – Pamsimas 2021 (FM CD).
- g) Juara I Lomba Stand dan Produk UP2K (Pokja 2) Pada Jambore Kader PKK Berprestasi ke XVIII Tingkat Provinsi Sumbar Tahun 2021.
- h) Harapan II Kategori Kabupaten Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital Tingkat Prov Sumbar tahun 2021.

- i) Juara I Kategori Kabupaten Lomba Kelompok UP2K-PKK Tingkat Prov Sumbar Tahun 2021.
- j) Harapan III Kategori Kabupaten Lomba Keluarga PKK Gagah Bencana Tingkat Prov Sumbar Tahun 2021.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2021 ini disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2021. Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, sarana peningkatan kinerja instansi pemerintah yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja, hasil (outcome) yang dicapai dalam kurun waktu satu tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat dan seluruh pihak terkait. Sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021, menunjukkan bahwa bahwa capaian kinerja DPMD/N rata-ratanya adalah **103%**. Sehingga dikategorikan berhasil dengan **sangat baik**. Pelaksanaan Program Kegiatan pada Tahun Anggaran 2021, untuk mewujudkan visi dan misi DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota secara umum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditanda tangani oleh Kepala DPMD/N dengan

Bupati Lima Puluh Kota. Seluruh indikator kinerja mencapai target dengan kategori penilaian/pencapaian sangat tinggi (diatas 100%).

B. Langkah Peningkatan di Masa Datang

Demi untuk peningkatan pencapaian kinerja di masa yang akan datang, perlu mensinkronkan antara Indikator Kinerja yang tercantum pada Renstra dan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta dengan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi OPD. Pemilihan Kegiatan yang akan mendukung Sasaran Strategis juga tak kalah penting untuk jadi perhatian dari semua pihak pelaksana kegiatan. Selain itu diperlukan juga dukungan dana/anggaran yang mencukupi dari Pemerintah Daerah, sehingga kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan dengan optimal. Semoga dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari pada Tahun 2021.

LAMPIRAN 4. SERTIFIKAT / PENGHARGAAN TAHUN 2021

KEGIATAN PKK



Created by: [illegible]





PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PIAGAM PENGHARGAAN

NO. 54/PP/PPKK-PROV/VII/2021



KETUA TIM PENGGERAK PKK PROVINSI SUMATERA BARAT
MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA:

NAGARI : BATU HAMPAR
KECAMATAN : AKABILURU
KABUPATEN : LIMA PULUH KOTA

YANG TELAH BERHASIL SEBAGAI

JUARA I

KATEGORI KABUPATEN

**LOMBA KELOMPOK UP2K-PKK
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021**

SESUAI DENGAN KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK PROVINSI SUMATERA BARAT NO. 25/KEP/PPKK-PROV/VII/2021, TANGGAL 5 JULI 2021.

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021.

DEMIKIANLAH PENGHARGAAN INI DIBERIKAN, SEMOGA ALLAH SWT AKAN
MEMBERKAHKI KITA SEMUA, AMIIN.

PADANG, 6 JULI 2021

KETUA,

NY. H.J. HARNELLI MAHYELDI





PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PIAGAM PENGHARGAAN

NO: 42/PP/PPKK-PROV/II/2021



KETUA TIM PENGGERAK PKK PROVINSI SUMATERA BARAT
MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA:

NAGARI : BATU HAMPAR
KECAMATAN : AKABILURU
KABUPATEN : LIMA PULUH KOTA

YANG TELAH BERHASIL SEBAGAI

HARAPAN III

KATEGORI KABUPATEN

LOMBA KELUARGA PKK GAGAH BENCANA
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021

SESUAI DENGAN KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK PROVINSI SUMATERA BARAT NO. 25/KEP/PPKK-PROV/II/2021, TANGGAL 5 JULI 2021.

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

DEMIKIANLAH PENGHARGAAN INI DIBERIKAN, SEMOGA ALLAH SWT AKAN
MEMBERKAHI KITA SEMUA, AMIIN.

PADANG, 6 JULI 2021

KETUA,

NY. HJ. HARNELLI MAHYELDI





PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PIAGAM PENGHARGAAN

NO: 83/PP/PPKK-PROV/ VII/2021



KETUA TIM PENGGERAK PKK PROVINSI SUMATERA BARAT
MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA :

TIM PENGGERAK PKK

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

YANG TELAH BERHASIL SEBAGAI

JUARA I

**LOMBA STAND DAN PRODUK UP2K
(POKJAS)**

PADA JAMBORE KADER PKK BERPRESTASI KE XVIII
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021
DI PANTAI GANDORIAH KOTA PARIAMAN
PADA TANGGAL 06 S.D 08 JULI 2021.

DEMIKIANLAH PENGHARGAAN INI DIBERIKAN, SEMOGA ALLAH SWT
AKAN MEMBERKAHI KITA SEMUA, AMIIN.

PARIAMAN, 08 JULI 2021

KETUA,

NY. H.J. HARNELI MAHYELDI



PENGHARGAAN PAMSIMAS TAHUN 2021

